

Daftar Pustaka

A. Buku

Ardianto, Elvinaro dkk.. *Komunikasi Massa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2007

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006.

_____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004

_____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesi Pasca Reformasi*, Jakarta: Gramedia. 2006

_____. *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Attamimi, A. Hamid.S. *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*. Jakarta: Disertasi. Universitas Indonesia. 1990

B. Kusuma, Ananda. (et.al) (ed.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 1992.

Gultom, Binsar. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia: Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia Kurang Efekf?*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006

Indrati, Maria Farida. *Ilmu perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2007

_____. *Ilmu perundang-undangan(1)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2013

_____. *Ilmu perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2007

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT, Citra Aditya Bhakti. Cet.1. 2004

Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: 1979

Sihombing, Herman, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1996

Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: UI Press. 2007

_____ dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2010

Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014

Wakland, S.A. *The Legislative Process in Great Britain*. New York-Washington :Frederick A. Praeger Publisher. 1968

Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Protokol Opsional Pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

A. Jurnal

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Polik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2009.

Mardian Wibowo, *Menakar Konstusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015.

Muhammad Syarif Nuh, *Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Penggan UndangUndang*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 18, No. 2, 2011.

Reza Fikri Febriansyah, "*Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perpu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia*" Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, No. 4, 2012. Victor Imanuel W. Nalle, "Blasphemy Law and Public Neutrality in Indonesia", *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 8, No. 2, 2017.

B. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

E. Koran dan Internet

[https://www.kompasiana.com/satriya1998/uu-nomor-17-tahun-2013-tentang organisasi-kemasyarakatan-perlu-dipahami](https://www.kompasiana.com/satriya1998/uu-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-perlu-dipahami). November 2017

<https://www.kompasiana.com/dendy166/dampak-perppu-pembubaran-ormas-anti-pancasila-terhadap-proses-demokrasi-indonesia>. November 2017

www.eramuslim.com, *5 Cacat Perppu Ormas Menurut Komnas HAM*, senin, tanggal 23 Juli 2018

Yati Andriyati, Konfrontasi.com, *Perppu Ormas Berpotensi Langgar HAM*, Jakarta, Kamis, 23 Juli, 2018

www.eramuslim.com, *5 Cacat Perppu Ormas Menurut Komnas HAM*, diakses pada hari senin, tanggal 23 Juli 2018